

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018**

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 25 Januari 2018  
Kepala BPTP Pontianak,

Ir. Sajarwadi, M.Agr.  
NIP. 196207091989031001

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	
Pernyataan Telah Direviu.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan	
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	6
II. Neraca .....	6
III. Laporan Operasional .....	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum .....	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran .....	20
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	20
B.2. Belanja .....	22
B.3. Belanja Pegawai .....	22
B.4. Belanja Barang .....	23
B.5. Belanja Modal .....	24
B.5.1. Belanja Modal Tanah .....	24
B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....	25
B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	26
C.1. Aset Lancar .....	26
C.1.1. Persediaan .....	26
C.2. Aset Tetap .....	26
C.2.1. Tanah .....	26
C.2.2. Peralatan dan Mesin .....	26
C.2.3. Gedung dan Bangunan .....	27
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	28
C.2.5. Aset Tetap Lainnya .....	29
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	29
C.3. Piutang Jangka Panjang	
C.4. Aset Lainnya	
C.4.1. Aset Tak Berwujud .....	29
C.4.2. Aset Lain-lain.....	29
C.4.3. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya .....	29
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	
C.6. Ekuitas	
C.6.1. Ekuitas .....	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	30
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya .....	30
D.2. Beban Pegawai .....	31
D.3. Beban Persediaan .....	31
D.4. Beban Barang dan Jasa .....	32
D.5. Beban Pemeliharaan.....	33

D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	33
D.7.	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat .....	33
D.8.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	34
D.9.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional .....	35
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	35
E.1.	Ekuitas Awal .....	35
E.2.	Surplus/Defisit-LO.....	35
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	35
E.4.	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas .....	35
E.4.1.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	36
E.4.2.	Penyesuaian Nilai Aset .....	37
E.4.3.	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	38
E.5.	Transaksi Antar Entitas .....	36
E.5.1.	Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	37
E.6.	Ekuitas Akhir .....	37
F.	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	
F.1.	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca .....	38
F.2.	Pengungkapan Lain-lain .....	38

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 25 Januari 2018  
Kepala BPTP Pontianak,

Ir. Sajarwadi, M.Agr.  
NIP. 196207091989031001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp219.493.264,00 atau mencapai 399,81% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp54.900.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp16.374.988.939,00 atau mencapai 91,35% dari alokasi anggaran sebesar Rp17.925.364.000,00

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp63.089.850.112,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp62.610.954.182,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp478.895.930,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp63.089.850.112,00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp20.182.022,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp12.677.933.411,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-12.657.751.389,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp199.311.242,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-12.458.440.147,00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp57.971.291.861,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-12.458.440.147,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.421.502.723,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16.155.495.675,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp63.089.850.112,00.

## **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018			31 Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	54.900.000,00	219.493.264,00	399,81	14.723.254,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>54.900.000,00</b>	<b>219.493.264,00</b>	<b>399,81</b>	<b>14.723.254,00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.3.	5.702.932.000,00	5.053.426.177,00	88,61	5.418.449.453,00
Belanja Barang	B.4.	7.086.579.000,00	6.213.689.804,00	87,68	4.014.725.072,00
Belanja Modal	B.5.	5.135.853.000,00	5.107.872.958,00	99,46	663.041.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>17.925.364.000,00</b>	<b>16.374.988.939,00</b>	<b>91,35</b>	<b>10.096.215.525,00</b>



## II. NERACA

**BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Persediaan	C.1.1.	0,00	2.649.000,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>0,00</b>	<b>2.649.000,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.2.1.	46.508.567.552,00	45.873.430.552,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	11.672.559.679,00	9.903.860.079,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	13.392.143.358,00	10.057.741.400,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	306.259.500,00	498.859.500,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	39.292.250,00	39.292.250,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6.	-8.485.966.270,00	-7.571.693.529,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6.	-802.849.944,00	-800.616.576,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6.	-19.051.943,00	-32.230.815,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>62.610.954.182,00</b>	<b>57.968.642.861,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	59.900.000,00	59.900.000,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	1.129.544.100,00	225.541.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.4.3.	-650.648.170,00	-225.541.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-59.900.000,00	-59.900.000,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>478.895.930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>63.089.850.112,00</b>	<b>57.971.291.861,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.6.	63.089.850.112,00	57.971.291.861,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>63.089.850.112,00</b>	<b>57.971.291.861,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>63.089.850.112,00</b>	<b>57.971.291.861,00</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	20.182.022,00	14.723.254,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>20.182.022,00</b>	<b>14.723.254,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	5.053.426.177,00	5.418.449.453,00
Beban Persediaan	D.3.	187.077.535,00	98.422.600,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.733.485.219,00	1.781.193.574,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	909.489.703,00	758.683.901,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.918.790.847,00	1.348.079.997,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	467.495.500,00	25.846.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1.408.168.430,00	1.195.353.900,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>12.677.933.411,00</b>	<b>10.626.029.425,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-12.657.751.389,00</b>	<b>-10.611.306.171,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	144.661.000,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	54.650.242,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>199.311.242,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-12.458.440.147,00</b>	<b>-10.611.306.171,00</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1.	57.971.291.861,00	24.455.302.265,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2.	-12.458.440.147,00	-10.611.306.171,00
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3.	0,00	0,00
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1.	-170.932.500,00	21.863.000,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.2.	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3.	1.592.435.223,00	34.023.940.496,00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.5.	16.155.495.675,00	10.081.492.271,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>63.089.850.112,00</b>	<b>57.971.291.861,00</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan :

mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisa teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, serta memberikan bimbingan teknis penetapan sistem manajemen mutu dan laboratorium.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 permentan No:10 /permentan/OT.140/2/2008 BPTP Pontianak menyelenggarakan Fungsi :

- a) Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT ) perkebunan;
- b) Pelaksanaan Analiss data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhinya;
- c) Pelaksanaan analis dan gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktoryang mempengaruhi.
- d) Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan dan pelepasan agens hayati OPT Perkebunan;
- e) Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik Pengembangan OPT perkebunan;
- f) Pelaksanaan Eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT Perkebunan.
- g) Pelaksanaan Pengembangan teknologi perbanyakan, Penilaian kualitas , dan pelepasan hayati OPT Perkebunan;
- h) Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan , penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT Perkebunan;
- i) Pelaksanaan Pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;
- j) Pemberian Pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
- k) Pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
- l) Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium;
- m) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai
- n) Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik Pengembangan OPT perkebunan;
- o) Pelaksanaan Eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT Perkebunan.
- p) Pelaksanaan Pengembangan teknologi perbanyakan, Penilaian kualitas , dan pelepasan hayati OPT Perkebunan;
- q) Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan , penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT Perkebunan;
- r) Pelaksanaan Pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;
- s) Pemberian Pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
- t) Pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

- u) Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium;
- v) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak adalah sebagai berikut:

##### **(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### **(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(5) Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);



- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(6) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa Layanan Umum	42.650.000,00	42.650.000,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	12.250.000,00	12.250.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>54.900.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.616.334.000,00	5.498.625.000,00
Belanja Lembur	40.000.000,00	40.000.000,00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	146.598.000,00	164.307.000,00
Belanja Barang Operasional	476.850.000,00	476.850.000,00
Belanja Barang Non Operasional	2.133.939.000,00	1.556.029.000,00
Belanja Barang Persediaan	184.600.000,00	184.600.000,00
Belanja Jasa	1.018.810.000,00	1.052.810.000,00
Belanja Pemeliharaan	950.460.000,00	950.460.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.408.830.000,00	2.396.690.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	469.140.000,00	469.140.000,00
Belanja Modal Tanah	96.000.000,00	96.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.695.040.000,00	1.695.040.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.788.763.000,00	3.344.813.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>18.025.364.000,00</b>	<b>17.925.364.000,00</b>

### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp219.493.264,00 atau mencapai 399,81% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp54.900.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0,00	400.000,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	12.250.000,00	161.243.000,00	1.316,27
Pendapatan Jasa Layanan Umum	42.650.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	54.650.264,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	3.200.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>219.493.264,00</b>	<b>399,81</b>

Realisasi Pendapatan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.390,79% dibandingkan TA 2017. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	400.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	161.243.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa	0,00	12.400.000,00	-100,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	54.650.264,00	254,00	21.515.751,97
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	3.200.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0,00	2.323.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>219.493.264,00</b>	<b>14.723.254,00</b>	<b>1.390,79</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp16.374.988.939,00 atau 91,35% dari anggaran belanja sebesar Rp17.925.364.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

### Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Belanja</b>			
Belanja Pegawai	5.702.932.000,00	5.053.611.488,00	88,61
Belanja Barang	7.086.579.000,00	6.213.689.804,00	87,68
Belanja Modal	5.135.853.000,00	5.107.872.958,00	99,46
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>17.925.364.000,00</b>	<b>16.375.174.250,00</b>	<b>91,35</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>-185.311,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>17.925.364.000,00</b>	<b>16.374.988.939,00</b>	<b>91,35</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 62,19% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Dikarenakan adanya kenaikan Pagu Belanja Barang
2. Dikarenakan adanya Kenaikan Pagu Belanja Modal yang signifikan.

### Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Belanja Pegawai	5.053.426.177,00	5.418.449.453,00	-6,74
Belanja Barang	6.213.689.804,00	4.014.725.072,00	54,77
Belanja Modal	5.107.872.958,00	663.041.000,00	670,37
<b>Total Belanja</b>	<b>16.374.988.939,00</b>	<b>10.096.215.525,00</b>	<b>62,19</b>

## B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.053.426.177,00 dan Rp5.418.449.453,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar -6,74% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Kenaikan Pagu Pagu Anggaran dan Terdapat Pegawai yang Pensiun di Tahun 2018.
2. sedangkan di Tahun 2018 Penambahan Pegawai Tidak sama jumlahnya dengan Pegawai yang Pensiun.

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.013.655.488,00	5.378.458.525,00	-6,78
Belanja Lembur	39.956.000,00	39.991.000,00	-0,09
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5.053.611.488,00</b>	<b>5.418.449.525,00</b>	<b>-6,73</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>-185.311,00</b>	<b>-72,00</b>	<b>257.276,39</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.053.426.177,00</b>	<b>5.418.449.453,00</b>	<b>-6,74</b>

#### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.213.689.804,00 dan Rp4.014.725.072,00. Realisasi belanja barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 54,77% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Terdapatnya Penambahan Pagu DIPA di Tahun 2018.

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	451.640.694,00	316.576.989,00	42,66
Belanja Barang Non Operasional	1.411.400.545,00	787.419.050,00	79,24
Belanja Barang Persediaan	184.428.535,00	100.921.600,00	82,74
Belanja Jasa	870.443.980,00	677.197.535,00	28,54
Belanja Pemeliharaan	909.489.703,00	758.683.901,00	19,88
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.918.790.847,00	1.348.079.997,00	42,34
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	467.495.500,00	25.846.000,00	1.708,77
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>6.213.689.804,00</b>	<b>4.014.725.072,00</b>	<b>54,77</b>

Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.213.689.804,00</b>	<b>4.014.725.072,00</b>	<b>54,77</b>

## B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.107.872.958,00 dan Rp663.041.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 670,37% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Terdapat Kenaikan Pagu Belanja Modal yang signifikan di Tahun 2018.

### Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	96.000.000,00	120.910.000,00	-20,60
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.668.649.600,00	332.531.000,00	401,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.343.223.358,00	209.600.000,00	1.495,05
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5.107.872.958,00</b>	<b>663.041.000,00</b>	<b>670,37</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.107.872.958,00</b>	<b>663.041.000,00</b>	<b>670,37</b>

### B.5.1. BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 96.000.000,00 dan Rp120.910.000,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 mengalami penurunan sebesar -20,60% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya penurunan aset tanah yang di urus, pada Tahun 2018 hanya 9 Persil, sedangkan Tahun 2017 sebanyak 12 Persil.

### Perbandingan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	96.000.000,00	120.910.000,00	-20,60
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>120.910.000,00</b>	<b>-20,60</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Jumlah Belanja</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>120.910.000,00</b>	<b>-20,60</b>
-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------

### B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.668.649.600,00 dan Rp332.531.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 401,80% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya Penambahan Dana Belanja Modal Peralatan dan mesin pada Tahun 2018.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.668.649.600,00	332.531.000,00	401,80
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.668.649.600,00</b>	<b>332.531.000,00</b>	<b>401,80</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.668.649.600,00</b>	<b>332.531.000,00</b>	<b>401,80</b>

### B.5.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.343.223.358,00 dan Rp209.600.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.495,05% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh Adanya Rehab Bangunan Kantor UPPT yang berada di Kabupaten dan Pembuatan Pagar Kantor UPPT di 3 Lokasi yaitu di Banig Kabupaten Sintang, Balai Karang Kabupaten Sanggau dan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.343.223.358,00	209.600.000,00	1.495,05
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.343.223.358,00</b>	<b>209.600.000,00</b>	<b>1.495,05</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.343.223.358,00</b>	<b>209.600.000,00</b>	<b>1.495,05</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.649.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	0,00	2.649.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.000,00</b>

### C.2. ASET TETAP

#### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp46.508.567.552,00 dan Rp45.873.430.552,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>45.873.430.552,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Reklasifikasi Masuk	526.129.500,00
Pengembangan Nilai Aset	96.000.000,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	539.137.000,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Keluar	-526.129.500,00
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>46.508.567.552,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

#### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing

sebesar Rp11.672.559.679,00 dan Rp9.903.860.079,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>9.903.860.079,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	1.540.575.600,00
Reklasifikasi Masuk	192.600.000,00
Pengembangan Nilai Aset	128.074.000,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-92.550.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>11.672.559.679,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-8.485.966.270,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>3.186.593.409,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Terdapat Lelang Kendaraan Roda 2 sebanyak 22 Unit dan Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 Unit.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp13.392.143.358,00 dan Rp10.057.741.400,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>10.057.741.400,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pengembangan Nilai Aset	1.375.865.937,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	1.053.298.223,00
Pengembangan Melalui KDP	1.967.357.421,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-250.666.523,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-811.453.100,00
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>13.392.143.358,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-802.849.944,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>12.589.293.414,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Terdapat Nilai Gedung dan Bangunan yang ditransfer keluar dikarenakan Gedung dan Bangunan tersebut tidak masuk ke dalam BAST antara BPTP Pontianak dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat

#### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp306.259.500,00 dan Rp498.859.500,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>498.859.500,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Keluar	-192.600.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>306.259.500,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-19.051.943,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>287.207.557,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1. Terdapat Pengurangan Irigasi dan Jaringan di Karenakan adanya salah Pencatatan atau Kodefikasi Jaringan dan Irigasi.

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp39.292.250,00 dan Rp39.292.250,00.

#### C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-9.307.868.157,00 dan Rp-8.404.540.920,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
----	------------	-----------------	-----------------	------------

1.	Peralatan dan Mesin	11.672.559.679,00	-8.485.966.270,00	3.186.593.409,00
2.	Gedung dan Bangunan	13.392.143.358,00	-802.849.944,00	12.589.293.414,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	306.259.500,00	-19.051.943,00	287.207.557,00
4.	Aset Tetap Lainnya	39.292.250,00	0,00	39.292.250,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>25.410.254.787,00</b>	<b>-9.307.868.157,00</b>	<b>16.102.386.630,00</b>

#### C.4. ASET LAINNYA

##### C.4.1. ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp59.900.000,00 dan Rp59.900.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	59.900.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>59.900.000,00</b>

##### C.4.2. ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.129.544.100,00 dan Rp225.541.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak serta dalam proses penghapusan dari BMN.

##### C.4.3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-710.548.170,00 dan Rp-285.441.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	59.900.000,00	-59.900.000,00	0,00
2.	Aset Lain-lain	1.129.544.100,00	-650.648.170,00	478.895.930,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>1.189.444.100,00</b>	<b>-710.548.170,00</b>	<b>478.895.930,00</b>

## C.6. EKUITAS

### C.6. EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp63.089.850.112,00 dan Rp57.971.291.861,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp20.182.022,00 dan Rp14.723.254,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan Anggaran Lain-lain	22,00	254,00	-91,34
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	0,00	12.400.000,00	-100,00
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	3.200.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	13.700.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	400.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	0,00	2.323.000,00	-100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	2.882.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.182.022,00</b>	<b>14.723.254,00</b>	<b>37,08</b>

Terdapat Peningkatan PNBPN pada Tahun 2018 di dapat dari sewa Asrama dan Pendapatan Jasa kegiatan Laboratorium Lapang.

## D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.053.426.177,00 dan Rp5.053.426.177,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	3.657.428.540,00	3.962.108.900,00	-7,69
Beban Pembulatan Gaji PNS	38.959,00	40.979,00	-4,93
Beban Tunj. Anak PNS	60.895.678,00	61.626.642,00	-1,19
Beban Tunj. Beras PNS	163.451.940,00	176.994.480,00	-7,65
Beban Tunj. Fungsional PNS	143.910.000,00	173.820.000,00	-17,21
Beban Tunj. PPh PNS	6.022.712,00	5.725.452,00	5,19
Beban Tunj. Struktural PNS	47.340.000,00	37.440.000,00	26,44
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	250.803.348,00	254.293.000,00	-1,37
Beban Tunjangan Umum PNS	141.030.000,00	131.120.000,00	7,56
Beban Uang Lembur	39.956.000,00	39.991.000,00	-0,09
Beban Uang Makan PNS	542.549.000,00	575.289.000,00	-5,69
<b>Jumlah</b>	<b>5.053.426.177,00</b>	<b>5.418.449.453,00</b>	<b>-6,74</b>

Terdapat Pegawai BPTP Pontianak yang Pensiun, sedangkan Petugas Pengganti atau Droning Pegawai lebih sedikit dibanding yang Pensiun.

## D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp187.077.535,00 dan Rp98.422.600,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan konsumsi	187.077.535,00	98.422.600,00	90,08
<b>Jumlah</b>	<b>187.077.535,00</b>	<b>98.422.600,00</b>	<b>90,08</b>

Terdapat Kenaikan Belanja Persediaan dan adanya Kegiatan Desa Organik.

#### D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.733.485.219,00 dan Rp1.781.193.574,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Bahan	639.610.300,00	214.069.800,00	198,79
Beban Barang Non Operasional Lainnya	587.750.245,00	467.909.250,00	25,61
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	97.800.000,00	84.360.000,00	15,93
Beban Honor Output Kegiatan	184.040.000,00	105.440.000,00	74,54
Beban Jasa Konsultan	588.000.000,00	422.940.000,00	39,03
Beban Jasa Profesi	85.250.000,00	63.450.000,00	34,36
Beban Keperluan Perkantoran	310.015.274,00	224.909.949,00	37,84
Beban Langganan Air	16.714.953,00	7.177.100,00	132,89
Beban Langganan Listrik	173.423.102,00	161.790.905,00	7,19
Beban Langganan Telepon	4.055.925,00	4.239.530,00	-4,33
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	37.048.500,00	0,00	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.776.920,00	7.307.040,00	-7,25
Beban Sewa	3.000.000,00	17.600.000,00	-82,95
<b>Jumlah</b>	<b>2.733.485.219,00</b>	<b>1.781.193.574,00</b>	<b>53,46</b>

Terdapat kenaikan Anggaran pada kegiatan Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2018.



#### D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp909.489.703,00 dan Rp758.683.901,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	354.915.250,00	230.130.550,00	54,22
Beban Pemeliharaan Jaringan	26.995.900,00	25.000.000,00	7,98
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	527.578.553,00	503.553.351,00	4,77
<b>Jumlah</b>	<b>909.489.703,00</b>	<b>758.683.901,00</b>	<b>19,88</b>

Terdapat Kenaikan Anggaran Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Pemeliharaan Peralatan dan Mesin di Tahun 2018.

#### D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.918.790.847,00 dan Rp1.348.079.997,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	1.762.861.947,00	959.679.453,00	83,69
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	155.928.900,00	388.400.544,00	-59,85
<b>Jumlah</b>	<b>1.918.790.847,00</b>	<b>1.348.079.997,00</b>	<b>42,34</b>

Terdapat Kenaikan Anggaran Perjalanan Dinas dan Penambahan Kegiatan di Tahun 2018.

#### D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing

sebesar Rp467.495.500,00 dan Rp25.846.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	467.495.500,00	25.846.000,00	1.708,77
<b>Jumlah</b>	<b>467.495.500,00</b>	<b>25.846.000,00</b>	<b>1.708,77</b>

Terdapat kenaikan Anggaran yang signifikan dan Bertambahnya Kegiatan di Masyarakat atau kawasan Desa Organik di Tahun 2018.

#### D.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.408.168.430,00 dan Rp1.195.353.900,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	573.086.356,00	349.134.988,00	64,14
Beban Penyusutan Irigasi	8.267.056,00	13.592.778,00	-39,18
Beban Penyusutan Jaringan	221.572,00	221.572,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	12.370.705,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	814.222.741,00	832.404.562,00	-2,18
<b>Jumlah</b>	<b>1.408.168.430,00</b>	<b>1.195.353.900,00</b>	<b>17,80</b>

Terdapat Penyusutan Gedung dan Bangunan.

## D.9. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	144.661.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	26.194.440,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	28.455.802,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>199.311.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp57.971.291.861,00 dan Rp24.455.302.265,00.

### E.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-12.458.440.147,00 dan Rp-10.611.306.171,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

### E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.421.502.723,00 dan Rp34.045.803.496,00.

#### E.4.1. KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-170.932.500,00 dan Rp21.863.000,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Akumulasi Penyusutan Irigasi	21.667.500,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-192.600.000,00
Irigasi	-192.600.000,00
Peralatan dan Mesin	192.600.000,00
Tanah	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>-170.932.500,00</b>

#### E.4.2. PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

#### E.4.3. SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.592.435.223,00 dan Rp34.023.940.496,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	539.137.000,00
Gedung dan Bangunan	802.631.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.592.435.223,00</b>

#### E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp16.155.495.675,00 dan Rp10.081.492.271,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan

dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	16.374.988.939,00
Diterima dari Entitas Lain	-219.493.264,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.155.495.675,00</b>

#### E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2018 saldo DDEL adalah sebesar Rp-219.493.264,00 sedangkan DKEL sebesar Rp16.374.988.939,00.

#### E.6. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp63.089.850.112,00 dan Rp57.971.291.861,00.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Terdapat Aset Lain-lain senilai 1,129.544.100, berupa Aset Tetap yang tidak ditemukan sebanyak 9 NUP berupa Gedung dan Bangunan senilai 811.453.100,-- 1 unit Mobil yang sudah dihentikan penggunaannya senilai Rp. 92.550.000,--, dan 22 Unit kendaraan roda 2 senilai Rp. 132.991.000,-- Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak ditemukan dan 22 unit motor kondisi rusak berat belum diusulkan persetujuannya ke Ditjen Perkebunan, sedangkan 1 unit mobil yang dihentikan penggunaannya sudah dilakukan proses lelang dan telah terbit risalah lelangnya namun belum diusulkan penghapusan ke Ditjen Perkebunan.

Terdapat Akun setoran yang salah, sudah dilakukan Perbaikan ke KPPN Pontianak dengan Nomor Surat :S-481/WPB.17//KP.0104/2019 Tnggal, 22 Januari 2019.

Berkewajiban melakukan Aploud ulang e Rekon ke KPPN Pontianak untuk memperbaiki setoran yang membebani Anggaran Tahun Berjalan.

### **F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Aset Lain-lain berupa : 1 unit Mobil yang sudah dihentikan penggunaannya senilai Rp. 92.550.000,--, dan 22 Unit kendaraan roda 2 senilai Rp. 132.991.000,-- Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak ditemukan dan 22 unit motor kondisi rusak berat telah diusulkan persetujuannya ke Ditjen Perkebunan, tinggal menunggu hasil Persetujuannya.

Telah melakukan Aploud ulang eRekon ke KPPN Pontianak untuk memperbaiki Neraca yang terdapat Saldo Tidak Normal.

Telah dilakukan Aploud ulang e Rekon ke KPPN Pontianak untuk memperbaiki setoran yang membebani Anggaran Tahun Berjalan berubah menjadi setoran Tahun Anggaran yang lalu.